

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MENGEMBANGKAN PERTANIAN PANGAN SEBAGAI POTENSI UNGGULAN**Dicki Riyatno¹, Mohamad Adiet Sandy Tyas², Ahmad Muksin³**^{1,2}Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Nasional Jakarta³Dosen Magister Administrasi Publik, Universitas Nasional JakartaEmail: dickyriyatno@gmail.com¹, adietsandi25@gmail.com²,moechsienahmad@gmail.com³**Abstract:**

Regional autonomy means granting authority to local governments to independently regulate and manage national affairs. In other terms, local governments have the right and obligation to form decisions related to local interests. It is that the authority and responsibility are transferred to a lower regional level than the central government. The purpose of granting this autonomy is so that regions can be able to have political equality, regional responsibility (local accountability, and local responsiveness). Indramayu Regency is an area that receives autonomy which in this case becomes a government under the province located in the province of West Java. The agricultural sector, especially food crops in Indramayu Regency can be said to be a sector that has great potential in contributing to the economy of Indramayu Regency. In this case, Indramayu Regency has been known as the granary of West Java rice as a result it is very relative as this potential to become the leading sector of the Indramayu Kabupaten area.

Keywords: *Regional Development; Featured Potential***Abstrak:**

Otonomi wilayah artinya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk secara mandiri mengatur serta mengelola urusan nasional. dengan istilah lain, pemda memiliki hak dan kewajiban untuk membentuk keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. ialah kewenangan serta tanggung jawab ditransfer ke taraf daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Tujuan diberikannya otonomi ini supaya wilayah bisa mampu mempunyai kesetaraan politik (political equality), tanggung jawab wilayah (local accountability, serta kesadaran daerah (local responsiveness). Kabupaten Indramayu ialah daerah yang menerima otonomi yang mana pada hal ini menjadi pemerintahan di bawah propinsi yang terletak pada provinsi Jawa Barat. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan pada Kabupaten Indramayu bisa dikatakan termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini Kabupaten Indramayu selama ini dikenal menjadi lumbung padi Jawa Barat sebagai akibatnya sangat relatif sebagai potensi ini menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: Pengembangan Daerah; Potensi Unggulan

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional (Gibbs & O'Neill, 2018; Trisna & Muluk, 2018). Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Ialah kewenangan serta tanggung jawab ditransfer ke taraf daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menetapkan otonom daerah menjadi hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengawasi masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Juhriyah et al., 2022; Mulyanto, 2008).

Selain itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan adanya otonomi daerah tersebut maksud dan tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk memberikan hak kepada daerah agar mendapatkan kesetaraan *politik (political equality)*, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik (Trisna & Muluk, 2018).

Selain itu pemberian otonomi ini juga agar pemerintah daerah dapat melakukan tanggung jawab daerah (*local accountability*), yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (sdm), dan sumber daya buatan (SDB) yang terdapat pada wilayah bagi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat serta wilayahnya (Tanjung et al., 2023).

Kemudian tujuan lainnya diberikan otonomi kepada daerah agar dapat menumbuhkan kesadaran daerah (*local responsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuhkembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara.

Tabel 1. Luas Panen Tanaman Padi (Ha/Hektar)

| Wilayah Jawa Barat | Luas Panen (Ha) | | |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2022 | 2021 |
| Cirebon | 82890 | 84892.18 | 84946.29 |
| Sumedang | 53486 | 56662.01 | 53341.28 |
| Indramayu | 231354 | 245329.29 | 227051.30 |
| Subang | 172983 | 177986.35 | 163946.70 |
| Purwakarta | 32011 | 34396.95 | 32930.64 |
| Karawang | 182672 | 204326.26 | 197916.30 |

Berdasarkan maksud dan tujuan dari adanya otonomi daerah, dalam penelitian ini akan membahas tentang tujuan dari otonomi daerah tentang Kesadaran Daerah (*local responsiveness*), yaitu kesadaran daerah untuk menumbuhkembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara.

Dalam hal ini setiap wilyah memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing agar dapat menjalankan kemandirian. Menurut Mulyanto (2008) mengatakan bahwa pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan

potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakatnya disitu khususnya, serta pada skala nasional.

Terkait dengan adanya pengembangan wilayah, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mendapatkan otonomi yang mana dalam hal ini sebagai pemerintahan di bawah propinsi yang terletak di provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang banyak karena wilayahnya di kelilingi berbagai sektor potensial salah satu yang utama adalah sektor pertanian padi dimana Kabupaten Indramayu memiliki lahan pertanian padi yang luas (Juswadi & Sumarna, 2022; Setyowati et al., 2019).

Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan di Kabupaten Indramayu dapat dikatakan termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu selama ini dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat (Setiani et al., 2021; Wu et al., 2019).

Berdasarkan Data BPS Jawa Barat tahun 2023 luas panen tanaman padi Kabupaten Indramayu terluas dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, tercatat luas panen pada tahun 2023 adalah 231.354 Hektar.

Dari data BPS tersebut Kabupaten Indramayu merupakan wilayah nomor satu luas panennya, sehingga dalam hal ini kabupaten Indramayu mendapatkan predikat lumbung padi, yang mana hal tersebut seperti yang di utarakan oleh presiden kita Bapak Ir. Joko Widodo dalam kunjungannya ke wilayah Indramayu dalam rangka panen raya pada jumat, 13 september 2023 lalu.

Terkait dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Indramayu dalam hal ini adalah lahan pertanian padi yang luas, upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dilakukan untuk meningkatkan produktifitas tananaman padi sebagai bentuk peran pemerintah dalam menumbuhkan potensi unggulan salah satunya dengan hilirisasi sistem drainase atau pengairan dan juga mengeluarkan kebijakan terkait harga eceran pupuk untuk menstabilkan produksi pertanian ini melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 521.33 Let me know if there is anything else I can help you with. Kep.468-DKPP Let me know if there is anything else I can help you with. 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Indramayu Tahun 2023 (Arikunto, 2002; Christia & Ispriyarso, 2019).

Lahan pertanian padi yang dimiliki kabupaten Indramayu merupakan sebuah potensi yang dimiliki wilayah tersebut sehingga upaya dalam mewujudkan otonomi daerah dalam kesadaran daerah dapat terwujud yang mana hal tersebut termasuk sebagai tujuan diberikannya otonomi kepada daerah. Dengan memanfaatkan luas wilayah pertanian kabupaten Indramayu dapat menjadikan hal ini sebagai potensi unggulan wilayah tersebut sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi secara baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan pula dikemukakan yang pada dasarnya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk menciptakan pengetahuan melalui pemahaman serta inovasi.

Pendekatan penelitian kualitatif artinya suatu proses penelitian serta pemahaman yang sesuai pada metode yang mengkaji suatu kenyataan sosial serta masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan narasumber dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, dikemukakan oleh Nasir bahwa "metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,

suatu obyek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Phd, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengembangkan potensi unggulan tidak lepas dari konsep pengembangan wilayah, yang mana dalam hal ini Wilayah diartikan sebagai suatu permukaan luas, yang dihuni manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya kapital, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya pembangunan lainnya, untuk mencapai taraf kesejahteraan ekonomi serta social bagi rakyat. Pengembangan daerah artinya suatu gerakan sebagian ataupun menyeluruh guna menaikkan fungsi lahan serta penataan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan serta kesejahteraan rakyat untuk memajukan daerah (Riskiawan et al., 2018).

Selain itu, pengembangan wilayah dapat juga dikatakan sebagai usaha memberdayakan pihak terkait di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumberdaya dengan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut (Adisasmita, 2011).

Dalam pengembangan wilayah dan juga potensi unggulan, pemerintah daerah harus memahami tentang komonditas unggulan yang dimiliki dan juga berpotensi di dalam wilayahnya tersebut. Berbicara komonditas unggulan dalam hal ini komonditas unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah.

Mengembangkan potensi unggulan tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran dalam proses pengembangannya yang mana peran tersebut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran Pemerintah Daerah terbagi atas peran yang lemah serta peran yang kuat.

Berdasarkan Leach, Stewart dan Walsh pada (Trisna & Muluk, 2018), peran Pemerintah Daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau wewenang yang sempit.
2. Cara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi telah diemban serta tingginya derajat kontrol eksternal

Kemudian berdasarkan Leach, Stewart dan Walsh pada (Trisna & Muluk, 2018) untuk peran pemda yang kuat bisa dipandang dari beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau wewenang yang luas
2. Cara untuk penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban serta derajat kontrol eksternal yang terbatas

Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mendapatkan otonomi yang mana dalam hal ini sebagai pemerintahan di bawah propinsi yang terletak di provinsi Jawa Barat. Kabupaten indramayu memiliki potensi yang banyak karena wilayahnya di kelilingi berbagai sektor potensial salah satu yang utama adalah sektor pertanian padi dimana Kabupaten Indramayu memiliki lahan pertanian padi yang luas (Riskiawan et al., 2018).

Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan di Kabupaten Indramayu dapat dikatakan termasuk sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu selama ini dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat

Berdasarkan Data BPS Jawa Barat tahun 2023 luas panen tanaman padi Kabupaten Indramayu terluas dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, tercatat luas panen pada tahun 2023 adalah 231.354 Hektar.

Dengan luas wilayah pertanian padi tersebut hal ini menjadi potensi unggulan yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu karena hal tersebut dapat menjadi pertumbuhan wilayah itu sendiri dan juga pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Indramayu.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indramayu dalam mengembangkan potensi unggulan tersebut terdiri dari beberapa cara diantaranya (Adisasmita, 2011):

1. Mengeluarkan kebijakan tentang harga eceran pupuk subsidi melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 521.3/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Indramayu Tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk bahwa peran pemerintah hadir dalam upaya menertibkan usaha produksi padi bagi masyarakat yang kesulitan tentang pupuk subsidi dan juga persoalan harga.
2. Upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan pertanian di Kabupaten Indramayu yaitu melalui investasi swasta. Dimana hal ini diharapkan akan membantu dalam proses percepatan transformasi pertanian antara lain melalui mekanisasi pertanian, hilirisasi produk pertanian dengan pembangunan pabrik pengolahan serta adanya jaminan pemasaran dan harga.
3. Rehabilitasi irigasi tersier, dam parit, long storage, embung, dan jalan usahatani yang tersebar di wilayah guna meningkatkan produksi komoditas pertanian.
4. Menggerakkan seluruh stakeholder untuk melaksanakan Program Pusat Pangan (Puspa) sebagai rumah bibit tanaman hortikultura dan kawasan percontohan masyarakat.
5. Menyusun data lahan dalam rangka Updating Lahan Baku Sawah, Lahan Sawah Dilindungi, Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan (LP2B) yang dilengkapi dengan peta-peta lahan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka melindungi, mengamankan dan mengatur ketentuan penggunaan lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan yang semakin cepat.

Dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indramayu dalam mengembangkan Pertanian Pangan sebagai potensi unggulan memiliki hasil yang sangat positif dimana hal ini ditandai dengan adanya penghargaan serta dampak dari pencapaian tersebut diantaranya adalah (Hamdani & Susanto, 2021):

1. Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil meningkatkan produksi padi dari Tahun 2020 sebesar 1.751.685,42 Ton GKP menjadi 1.768.478,46 Ton GKP di Tahun 2021 sehingga menjadi Daerah penghasil padi tertinggi di Indonesia.
2. Bupati Indramayu berhasil menerima Penghargaan dari Media Tribun Jabar kategori "Menjaga Ketahanan Pangan" pada acara Editor's Choice 2.0 Tribun Jabar tahun 2022.
3. Bupati Indramayu memperoleh Penghargaan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia yang berhasil menghantarkan Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten penghasil padi/beras terbesar tingkat nasional tahun 2022.
4. Panen raya tahun 2023 menghasilkan padi dengan harga tinggi yaitu Rp. 7500/Kg dimana ini adalah suatu rekor harga padi selama menjadi wilayah lumbung padi nasional.
5. Berhasil dalam mendukung Program Pupuk Bersubsidi yang sampai kepada petani dengan menyusun RDKK sebagai dasar kebutuhan petani dan menyusun Alokasi Pupuk Bersubsidi dengan mengikuti ketentuan alokasi pusat dan provinsi.

6. Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menyediakan cadangan pangan masyarakat dengan membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan melibatkan Kelompok Tani/Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Indramayu.

Dari berbagai upaya serta pencapaian yang dilakukan serta di hasilkan oleh Pemerintah Indramayu, jika di kaitkan dengan konsep pembangunan wilayah atau pengembangan potensi unggulan hal sudah terpenuhi dimana peran Pemerintah dalam pengembangan wilayah harus memiliki indikator yang sesuai dari konsep tersebut.

Dari konsep peran Pemerintah Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Trisna & Muluk, 2018), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal, yaitu Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit. Dalam hal ini Pemerintah Indramayu membuka rentang tanggung jawab seluas-luasnya di tandai dengan terlibatnya stekholder sehingga cakupan dari tanggung jawab tersebut akan luas dan dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat (Haris, 2004; Mustikaningrum & Widjonarko, 2018).

Kemudian Cara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif telah di hindari oleh Pemerintah Indramayu dimana dalam setiap upaya yang di lakukan selalu menganalisa sebelum terjadinya hal yang tidak di inginkan hal ini di tandai dengan adanya hasil postif bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu berhasil menyediakan cadangan pangan masyarakat dengan membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dengan melibatkan Kelompok Tani/Gapoktan yang tersebar di Kabupaten Indramayu, dimana hal ini sebagai bentuk upaya yang positif tidak reaktif (Hamdani & Susanto, 2021; Jonas et al., 2023).

Selanjutnya tentang Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang di emban dan tingginya derajat kontrol eksternal. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka kepada seluruh lapisan pemerintah baik melalui camat, kepala desa dan juga dinas-dinas terkait untuk bersama melakukan pembangunan wikayah yang mana hal tersebut memnjadikan derajat otonomi menjadi tinggi sehingga upaya dalam mengontrol eksternal dapat terjangkau secara baik dan terkendalai.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan otonomi daerah dan fokus pada pengembangan potensi unggulan, khususnya pertanian padi. Melalui kebijakan dan program yang terbukti berhasil, Indramayu diakui sebagai lumbung padi nasional. Pemerintah daerah berperan aktif dengan melibatkan berbagai stakeholder, menerapkan kebijakan proaktif, dan membangun sinergi dengan seluruh lapisan pemerintahan. Namun, saran penting yang perlu diperhatikan adalah mendorong penggunaan teknologi modern dalam pertanian, seperti sistem irigasi efisien dan implementasi teknologi informasi, serta memberikan dukungan pada riset dan inovasi, termasuk investasi dalam infrastruktur pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian. Pengembangan potensi unggulan di Kabupaten Indramayu perlu difokuskan pada pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian padi, seperti sistem irigasi efisien dan implementasi teknologi informasi. Pemerintah daerah telah berhasil melibatkan berbagai stakeholder dan menerapkan kebijakan proaktif, menjadikan Indramayu lumbung padi nasional. Namun, untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan dorongan terhadap penggunaan teknologi modern dan dukungan pada riset serta inovasi. Investasi dalam infrastruktur pertanian juga menjadi kunci untuk mendukung efisiensi dan kualitas hasil pertanian.

Saran-saran strategis perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengembangkan sektor pertanian. Penerapan teknologi modern seperti irigasi efisien dan teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi. Dukungan pada riset dan inovasi, bersama dengan investasi dalam infrastruktur pertanian, akan memberikan dampak positif terhadap

kualitas hasil pertanian dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan komunitas lokal. Strategi yang holistik dan berkelanjutan perlu ditempuh untuk meningkatkan sektor pertanian pangan di Kabupaten Indramayu.

BIBLIOGRAFI

- Adisasmita, I. S. A. (2011). Pengantar Perencanaan Transportasi. *Yogyakarta: PT Graha Ilmu*.
- Arikunto, S. (2002). Metodologi penelitian suatu pendekatan proposal. *Jakarta: PT. Rineka Cipta*, 16.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Gibbs, D., & O'Neill, K. (2018). Future green economies and regional development: a research agenda. *Transitions in Regional Economic Development*, 287–309.
- Hamdani, K. K., & Susanto, B. (2021). Identifikasi Komoditas Tanaman Pangan Unggulan di Kabupaten Indramayu Melalui Analisis LQ (Location Quotient): Identification of Leading Food Crop Commodities in Indramayu Regency through LQ (Location Quotient) Analysis. *Planta Simbiosis*, 3(1), 11–25.
- Haris, S. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jonas, J. B., Jonas, R. A., Bikbov, M. M., Wang, Y. X., & Panda-Jonas, S. (2023). Myopia: Histology, clinical features, and potential implications for the etiology of axial elongation. *Progress in Retinal and Eye Research*, 96, 101156.
- Juhriyah, J., Santoso, T. I., & Srimulyati, N. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Bonggol Pisang (*Musa paradisiaca*, L.) di Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. *Agri Wiralodra*, 14(2), 70–77.
- Juswadi, J., & Sumarna, P. (2022). Pengembangan Lokasi Agroindustri Buah-Buahan Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 10(1), 26–32.
- Mulyanto, H. R. (2008). Prinsip-prinsip Pengembangan Wilayah. *Graha Ilmu. Jakarta*.
- Mustikaningrum, I., & Widjonarko, W. (2018). Komoditas Unggulan Tanaman Pangan Untuk Mendukung Perekonomian Wilayah Kabupaten Indramayu. *Ruang*, 4(1), 57–65.
- Phd, M. N. (1998). *Metode Penelitian, _ Ghalia Indonesia*. Jakarta.
- Riskiawan, H. Y., Purnomo, B. H., Abdurahman, A., Hariono, B., & Puspitasari, T. D. (2018). Strategy of Trade-Reliable Featured Product Supporting Regional Innovation Systems. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1), 12117.
- Setiani, Y., Unang, U., & Rofatin, B. (2021). Penentuan Komoditas Unggulan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura di Setiap Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Agristan*, 3(2), 149–171.
- Setyowati, N., Ardianto, D. T., Khomah, I., & Widiyanti, E. (2019). Analysis of potential featured agriculture commodities and processed products in Sragen Regency. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 633(1), 12055.
- Tanjung, D., Kriswantriyono, A., Wulandari, Y. P., Suharjo, D., & Purnamadewi, Y. L. (2023). Pengembangan Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Desa-Kota Menuju Penguatan Ekonomi Jawa Barat. *Jurnal Resolusi Konflik, CSR Dan Pemberdayaan (CARE)*, 8(1), 62–76.
- Trisna, A., & Muluk, M. R. K. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 155–164.
- Wu, L., Huang, G., Fan, J., Zhang, F., Wang, X., & Zeng, W. (2019). Potential of kernel-based nonlinear extension of Arps decline model and gradient boosting with categorical features support for

Upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Mengembangkan Pertanian Pangan sebagai
Potensi Unggulan

predicting daily global solar radiation in humid regions. *Energy Conversion and Management*,
183, 280–295.

Copyright holder:

Dicki Riyatno¹, Mohamad Adiet Sandy Tyas², Ahmad Muksin³ (2023)

First publication right:

[Jurnal Syntax Admiration](#)

This article is licensed under:

